

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Saat ini tuntutan akuntabilitas yang semakin tinggi terhadap organisasi sektor publik di tingkat daerah. Melalui mekanisme pertanggungjawaban yang digunakan secara teratur, organisasi dituntut untuk mempertanggungjawabkan berhasil atau tidaknya pelaksanaan tujuannya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Nurillah, 2014). Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat melakukan langkah nyata untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Selanjutnya, pemerintah harus mampu menyampaikan laporan keuangan dengan data keuangan yang akurat. Secara khusus, laporan keuangan berkualitas tinggi harus memberikan informasi kepada pengguna yang dapat mereka manfaatkan untuk membuat keputusan mereka. (Sudiarti & Juliarsa, 2020). Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Dalam memenuhi amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, maka dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun. Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksaan atas laporan Keuangan pemerintah daerah setiap tahun.

Pada tahun 2021 kabupaten Bangkalan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Penilaian LKPD dimaksudkan untuk memberikan pandangan tentang bagaimana pemerintah daerah melaporkan laporan keuangannya. Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK adalah pernyataan professional pemeriksaan tentang “kewajaran” dari laporan keuangan yang disajikan dan bukan merupakan “jaminan” bahwa laporan keuangan pemerintah bebas dari fraud atau tindakan kecurangan lainnya (BPK, 2010). Dalam laporan tersebut BPK masih menemukan beberapa permasalahan, diantaranya sistem pelaporan manual belum sepenuhnya mendukung penyusunan laporan, penatausahaan aset belum tertib, dan juga keputusan kepala daerah terkait pembayaran honorarium belum sepenuhnya berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku (BPK, 2010).

Pada permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat masalah-masalah dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas di kabupaten Bangkalan. Dari masalah-masalah yang ditemukan oleh BPK dapat dijadikan evaluasi dan diharapkan pemerintah kabupaten Bangkalan dapat melakukan upaya-upaya terbaik untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Fenomena yang terjadi di dalam penyusunan laporan keuangan organisasi perangkat daerah yakni penyusunan laporan keuangan yang disusun oleh sumber daya manusia di bagian keuangan atau akuntansi belum sepenuhnya mengerti terhadap penyusunan laporan keuangan. Sehingga permasalahan-permasalahan di atas masih ditemukan. Karyawan merupakan SDM yang sangat berperan penting dalam menyusun laporan keuangan entitas ataupun organisasi, karena pengaruh kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan pegawai dapat membantu mereka dalam proses penyusunan laporan keuangan serta dapat membantu mereka mengatasi tantangan yang muncul sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas. Hasil penelitian yang dilakukan (Sudiarianti, 2015) menyebutkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sundari & Rahayu, 2019) yang juga menunjukkan secara simultan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian (Djoko Wibowo, 2022) yang menyebutkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Sejalan dengan itu penelitian (Aswandi, 2018) menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan yaitu *locus of control*. Salah satu unsur penting kinerja individu yang terdapat di dalam diri seseorang, yakni *locus of control* (Rotter, 1966). *Locus of control* merupakan suatu persepsi seseorang pada sebuah pencapaian ketika bertindak di segala aktivitas dalam hidupnya (Sudiarti & Juliarsa, 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Wikan et al., 2017), menunjukkan

bahwa *Locus of control* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, dimana apabila seseorang memiliki *locus of control* itu dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sri Damayanti & Pratiwi, 2022) hasil dari penelitian ini juga menyatakan bahwa *locus of control* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, dimana semakin tinggi *locus of control* yang dimiliki seseorang maka semakin baik kualitas laporan yang dihasilkan.

Selain faktor kompetensi SDM dan *Locus of control* ada faktor lain yang mempengaruhi laporan keuangan yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi berfungsi untuk mempermudah timbulnya komitmen pada suatu tujuan yang lebih luas daripada kepentingan diri individual seseorang (Oktaviyanti et al., 2017). Personil, struktur organisasi, dan sistem kontrol perusahaan berinteraksi dengan budaya organisasi untuk menetapkan norma perilaku. Budaya organisasi adalah sistem nilai dan keyakinan bersama. Karyawan baru benar-benar diajari budaya organisasi dengan mempelajari beberapa komponen budaya, tetapi kami hanya mempelajari fitur yang terlihat atau di permukaan saja (artefak). Karena asumsi fundamental adalah fitur yang tidak dapat dilihat dan tidak terlihat di permukaan, asumsi dasar yang berfungsi sebagai fondasi budaya tidak terpapar pada norma-norma perilaku yang diajarkan kepada anggota baru. itulah sebabnya ini terjadi. Budaya organisasi hanya memberikan pengetahuan kepada mereka yang diberi status tetap dan diizinkan bergabung dengan kelompok, dari situ anggota kelompok nantinya akan mengetahui rahasia organisasi.

Melalui proses sosialisasi, anggota baru diajarkan budaya organisasi dengan mengamati dan menyesuaikan dengan tuntutan organisasi dengan menggunakan praduga sebagai acuan. Sekalipun implisit dan tidak sistematis,

sosialisasi selalu merupakan proses pengajaran yang berlangsung. Sosialisasi selalu ada proses pengajaran yang terjadi meskipun tersirat dan tidak sistematis. Masih kurangnya koordinasi antar unit (OPD) di Kabupaten Bangkalan, rohingnya menyebabkan kurangnya pelayanan publik kepada masyarakat. Disiplin yang masih rendah dari aparatur sipil negara, serta masih adanya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Serta berkepribadian yang kurang baik hal ini kerap menjadi bahan laporan atas buruknya para pelayan masyarakat tersebut. Dari permasalahan tersebut, ke depan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan sekretariat daerah. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Oktaviyanti et al., 2017) menunjukkan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Jika budaya etis organisasi semakin tinggi, maka kualitas laporan keuangan juga semakin tinggi.

Penelitian tentang kualitas laporan keuangan daerah telah dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh (Sudiarti & Juliarsa, 2020), menyimpulkan bahwa kompetensi SDM dan *Locus of control* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Serta penelitian yang dilakukan oleh (Oktaviyanti et al., 2017) menyatakan bahwa secara parsial pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan budaya etis organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, dari beberapa penelitian sebelumnya masih terdapat ketidakkonsistenan hasil, sehingga memberikan motivasi kepada peneliti untuk meneliti kembali mengenai kualitas laporan mengenai pelaporan keuangan pemerintah. Dan juga peneliti menggunakan variabel yang masih jarang

digunakan oleh peneliti sebelumnya pada kualitas laporan keuangan, seperti variabel *locus of control*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah Bangkalan?
2. Apakah *Locus of control* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah Bangkalan?
3. Apakah Budaya organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk menguji pengaruh *Locus of control* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan
3. Untuk menguji mengetahui pengaruh Budaya Organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a) Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia *Locus of control* dan Budaya Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi OPD Kabupaten Bangkalan

Hasil penelitian ini menjadi bahan pertimbangan pada setiap OPD Kabupaten Bangkalan, pada bidang keuangan khususnya dalam penyusunan laporan keuangan dan dalam penilaian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku